

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia mencapai 280,73 juta jiwa, meningkat sebesar 1,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini berdampak langsung terhadap dinamika ketenagakerjaan nasional, salah satunya adalah persoalan pengangguran. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur permasalahan ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar kerja. Menurut Tarigan (2017), pengangguran muncul ketika jumlah angkatan kerja melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini menjadi masalah yang kompleks karena tidak hanya menyangkut ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga kualitas tenaga kerja, relevansi pendidikan, kondisi ekonomi makro, serta perkembangan sektor-sektor produktif. Anisa (2021) menambahkan bahwa semakin besar jumlah penduduk, maka tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan pasar juga semakin berat.

Secara nasional, data BPS menunjukkan bahwa Tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Agustus 2023 berada di angka 5,32%, turun dari 5,86% pada tahun sebelumnya. Meski begitu, angka ini masih sedikit lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19 pada Agustus 2019 yang

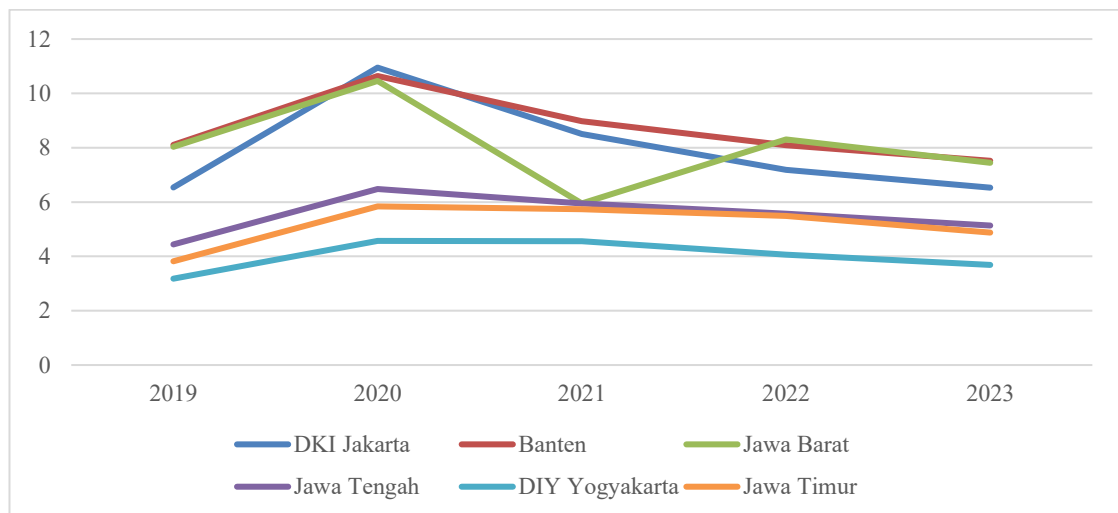
sebesar 5,23%. Pengangguran cenderung lebih tinggi di wilayah perkotaan (6,4%) dibandingkan dengan pedesaan (3,88%), mengindikasikan adanya ketimpangan kesempatan kerja antarwilayah. Selain itu, peningkatan jumlah angkatan kerja belum sepenuhnya diimbangi oleh pertumbuhan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

Kondisi ini juga tercermin di Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Jawa Barat secara konsisten mencatatkan TPT yang cukup tinggi dibandingkan provinsi lain, yang mencerminkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan ketersediaan lapangan kerja. Jawa Barat memiliki dinamika ekonomi dan sosial yang kompleks, dengan urbanisasi tinggi, industri padat karya, serta tekanan migrasi penduduk dari desa ke kota. Paradigma pembangunan yang berkelanjutan mengedepankan pertumbuhan ekonomi tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu sejalan dengan penurunan tingkat pengangguran, karena adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan, minimnya lapangan kerja yang berkualitas, serta kesenjangan keterampilan antara tenaga kerja yang tersedia dengan permintaan industri (BPS Jawa Barat, 2023).

Salah satu jenis pengangguran yang menjadi permasalahan penting dihadapi oleh negara Indonesia yaitu pengangguran terbuka. Menurut Himo, dkk (2022), pengangguran terbuka memiliki dampak yang signifikan terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan seperti menurunnya kualitas hidup sampai dengan kemiskinan. Menurut BPS (2023), pengangguran terbuka merupakan penduduk yang masuk dalam Angkatan kerja yaitu tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan,

serta yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat keadaan tinggi dan rendahnya angka pengangguran, TPT yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja (BPS, 2023). Pengangguran biasanya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau pencari kerja yang tidak sesuai dengan jumlah pekerjaan yang tersedia. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena pendapatan pengangguran berkurang sehingga dapat menimbulkan kemiskinan dan masalah social lainnya (Helvira dan Rizki, 2020). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi salah satu masalah pengangguran yang dialami Indonesia dari tahun ke tahun, yang dimana TPT di Pulau Jawa belum stabil karena setiap tahun mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun 2019-2023 yang signifikan seperti tercantum pada Grafik 1.1 yang terlampir sebagai berikut :



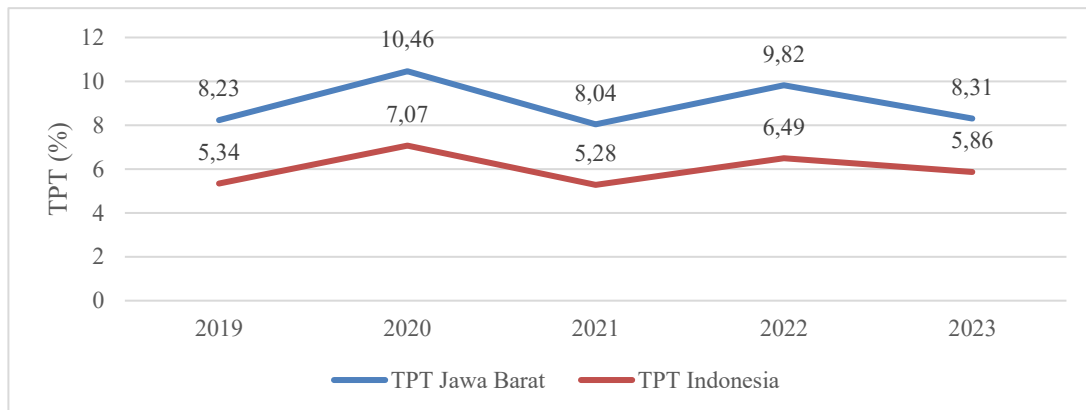
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1.1. Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2019-2023.

Dari enam provinsi yang ada di pulau Jawa, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pengangguran terbanyak. Berdasarkan Grafik diatas,

bahwa rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat merupakan yang tertinggi kedua setelah provinsi Banten dimana nilai rata-rata pengangguran sebesar 4,02%. Banten menjadi provinsi dengan TPT tertinggi dengan rata-rata 4,33% kemudian disusul dengan DKI Jakarta sebesar 3,97% dan Jawa Tengah sebesar 2,76% kemudian Jawa Timur sebesar 2,58% dan DIY Yogyakarta sebesar 2,01%. Dimana peningkatan pengangguran tertinggi di Jawa Barat berada di Tahun 2020 dengan total pengangguran sebesar 10,46%. Hal ini dapat terjadi karena belum tercapainya penggunaan penuh tenaga kerja, dan terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia membuat terjadinya PHK masal, yang dimana hal ini menjadi tugas untuk pemerintah setempat dalam menyelesaikan masalah terkait dengan pengangguran yang akan berdampak buruk secara ekonomi maupun social bagi Provinsi Jawa Barat.

Menurut Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (2023), terdapat keunggulan yang komparatif berupa sumber daya alam dan destinasi wisata yang sangat besar dan beragam di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Provinsi Jawa Barat memiliki aksesibilitas yang baik sehingga memudahkan pergerakan orang dan barang dalam skala regional maupun nasional. Hal tersebut seharusnya menjadi peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat menurunkan TPT yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tersebut. Akan tetapi kenyataannya dapat dilihat pada Gambar 1.2, TPT di Provinsi Jawa Barat masih tergolong tinggi dan selalu berada diatas angka rata-rata nasional Indonesia selama tahun 2019-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1.2. Perbandingan TPT di Indonesia dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 1.2, terlihat bahwa TPT di Indonesia dan Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 TPT di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan yang cukup tinggi, hal tersebut menjadi salah satu penyebab TPT di Indonesia pada tahun 2020 tersebut juga naik. Keadaan tersebut salah satunya dikarenakan adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja di seluruh bidang ketenagakerjaan di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2021 dan 2023 keadaan TPT di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan, meskipun mengalami penurunan TPT di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 masih dikategorikan tinggi, karena berada di atas angka nasional yang ditargetkan yaitu 5,5-6,3%, selain itu TPT di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 selalu berada diatas TPT nasional Indonesia.

Terdapat banyak alasan tingginya jumlah pengangguran di Jawa Barat. Salah satunya yaitu jumlah penduduk. Di mana jumlah penduduk di Jawa Barat terus mengalami peningkatan terlebih pada tahun 2014-2023. Pertumbuhan populasi tahunan dapat meningkatkan ukuran angkatan kerja. Setiap peningkatan angkatan kerja, dan jika tidak diintegrasikan ke dalam lapangan kerja,

menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran yang tinggi (Hartanto, 2017).

Selain hal di atas ada beberapa hal yang dapat menyebabkan naiknya jumlah pengangguran. Salah satunya adalah rata-rata lama sekolah penduduk, di mana rata-rata lama sekolah dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang maka dalam memperoleh kesempatan dan pekerjaan akan lebih mudah dan terjamin. Dengan pendidikan yang tinggi bagi seseorang, maka tingkat kemampuan intelektual akan lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang hanya mempunyai tamatan sekolah menengah, oleh sebab itu penentuan jenis atau lapangan pekerja bagi orang yang memiliki intelektual serta keterampilan dengan pendidikan yang tinggi lebih terbuka (Suhadi dan Setyowati, 2022).

Faktor kedua yang juga memiliki kontribusi dalam menyebabkan naiknya jumlah pengangguran yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB yang selalu meningkat. PDRB yang terus meningkat akan berpengaruh terhadap naiknya jumlah output dari produksi. Hal ini berdampak pada dibutuhkannya tambahan faktor produksi yaitu berupa tenaga kerja. Sehingga karena ini akan membantu dalam menikkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran (Jumaroh *et al*, 2021).

Faktor ketiga yaitu upah minimum. Setiap tahun pemerintah Indonesia akan menaikkan upah minimum daerah. Dan peraturan ini akan sangat dirasakan oleh pekerja sebagai jalan untuk dapat meningkatkan standar hidup mereka, sehingga peningkatan upah ini dapat membantu para pekerja. Pekerja akan bekerja dengan giat agar dapat menerima gaji penuh dan sesuai dengan kebutuhan keluarga

(Santoso & Kristiyanto, 2021). Upah menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingginya pengangguran, tingginya upah akan menimbulkan kenaikan pengangguran karena menurunnya permintaan tenaga kerja, sedangkan menurut pekerja upah merupakan nominal yang harus diterima dan diberikan sebagai balasan dari waktu dan tenaga (Suhadi dan Setyowati (2022)). Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota setiap tahunnya. Di mana hal ini berdampak pada banyaknya perusahaan yang memilih untuk memanfaatkan tenaga kerja mesin ataupun mengurangi tenaga kerja untuk menghemat pengeluaran. Sehingga menyebabkan banyak pekerja yang menganggur karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Faktor keempat yaitu Belanja Pemerintah Daerah. Wewenang yang dimiliki pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran. Salah satunya adalah belanja pemerintah agar program pembangunan ekonomi yang terstruktur dapat diraih. Dengan demikian pembangunan ekonomi daerah berlangsung secara optimal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak hanya mengutamakan tujuan akhir pertumbuhan produksi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran dapat diukur dengan indikator yang menunjukkan pengurangan pengangguran, ketimpangan dan kemiskinan, serta pemerataan pendidikan, ekonomi dan kesehatan (Safitri *et al*, 2021).

Keterbaruan dari penelitian ini ialah dengan memberikan wawasan baru dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhi pengangguran, seperti pertumbuhan penduduk, pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), upah minimum, dan belanja pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini

membandingkan angka pengangguran di Jawa Barat dengan rata-rata nasional Indonesia, memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi provinsi Jawa Barat.

Mengacu pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka persoalan yang penelitian yang ingin dipecahkan dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kondisi Rata-rata Lama Sekolah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota, Belanja Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023?
2. Bagaimana pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Belanja Pemerintah Daerah secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023?
3. Bagaimana pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Belanja Pemerintah Daerah secara bersama-sama terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Kondisi Rata-rata Lama Sekolah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota, Belanja Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023.
2. Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Belanja Pemerintah Daerah secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023.
3. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Belanja Pemerintah Daerah secara bersama-sama terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023.

1.4.Kegunaan Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti, penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagi pembaca, dapat dijadikan bahan rujukan dan sumber referensi bagi peneliti lain yang akan mengambil tema yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan materi pengajaran dan menjadi bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.
2. Bagi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat memberikan

